

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Bandung merupakan pusat administrasi dan pendidikan sejak abad ke-20. Menjelang masa revolusi tahun 1945, Bandung masih bertahan di sektor lamanya di dunia administrasi dan pendidikan, sementara sektor industri tidaklah begitu berkembang meskipun demikian sektor perkebunan yang telah lama diberdayakan sejak tujuh puluh tahun sebelumnya telah membantu menopang perekonomian Bandung selain bersinerji dengan pemerintah, kantor-kantor swasta, dan sekolah-sekolah. Demikian seperti kebanyakan kota-kota besar, Bandung juga merupakan kota yang memiliki pusat transportasi, di mana ditengah pemukiman, lahan-lahan sawah, dan bersisian dengan jalan raya, terbentang rel lalu lintas kereta api yang menghubungkan lalu-lintas timur dan barat kepulauan jawa. Lalu lintas dalam kota cukup ramai dan nampak jalan-jalan kecil hampir di setiap jalur-jalur sudut perkotaan. Kedatangan Jepang disertai upayanya menduduki berbagai kota di Indonesia, selama tiga tahun lebih, seluruh aset kota Bandung tadi hampir lumpuh. Dari mulai sektor perniagaan, perkebunan hingga tak berkembangnya sektor pendidikan. Disebutkan bahwa ada sekitar 437.000 jiwa terpaksa kemudian hidup dibawah standar kesejahteraan pada saat itu. ¹

¹ John R.W. Smail, *Bandung In The Early Revolution* (Cornel Universit: New York, 1964), hal, 3.

Kota Bandung sendiri dalam sejarahnya tidak lepas dari pengelolaan wilayah kekuasaan Belanda sejak masa VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) hingga masa kerajaan Belanda (Koninkrijk der Nederlanden). Dimasa negeri Belanda dibawah kekuasaan Inggris dan Perancis, Indonesia - yang kala itu disebut sebagai Hindia Belanda- dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal bernama Herman Willem Daendels (menjabat dari tahun 1808 hingga 1811). Pada bulan Mei 1810 Daendels menyarankan bupati Bandung; Wiranatakusumah II (menjabat sejak tahun 1794 hingga 1829) agar memindahkan pusat pemerintahan Bandung dari semula jauh di pedalaman, diharapkan lokasinya mendekati proyek lalu lintas “De Groote Postweg” dengan tujuan supaya memudahkan akses produksi dan proyek jalan pos yang sedang dikerjakan.

25 Bloei maand 1810 Verplating van de hoofd-negorijen in de regentschappen Bandoeng en Prakanmoentjang De landdrost der Jaccatrasche en Preanger bovenlanden hij missive hebbende to kennen gegeven, dat hem bij zijne jongste inspectie was to ooren gekomen, dat de hoofd-negorijen van Bandong en Praccanoentjang to verre van den nieuwen weg afgelegen waren, waardoor de werkzaamheden aan de postwegen als anderen sterk kwamen to lijden; met voordragt mitsdien om gedagte hoofd-negorijen to doen ver plaatsen, als die van Bandong naar Tjikapoendang en die van Praccanoentjang naar Andawadak, welke beide plaatsen aan den grooten weg gelegen en daartoe zeer ge-schikt waren; en considerende, dat behalve de voor de genoemde verplaatsing op-gegeven, plausible redenen, daardoor sevens onderscheidene cultures zullen worden bevorderd, uithoofde van de bijzondere geschiktheid, welke daardoor de gronden hebben, die in de environs van de opgemelde, tot hoofdnegorijen voorgedragen plaatsen gelegen zijn; is conform de gedane voordragt besloten de hoofd-negorij van Bandong to doen verleggen naar Tjikapoendang en die van Praccamoentjang naar Andawadak, met autorisatie op den gedagten landdrost om hieraan to geven de noodige executie. H.W. Daendels (Plakaatboek, XV, 1810)²

² Yenni Nur'aini, *Analysis Of The Preparedness Of Bandung Towards City Branding*, Thesis Submitted for Double Master Degree Program of Development Planning And Infrastructure Management School Of Architecture, Planning And Policy Development Institut Teknologi Bandung

Namun proposal Daendels tersebut diimplementasikan posisinya di sebelah barat sungai Cikapundung oleh Wiranatakusumah II, sejak itu pada bulan September tanggal 25 Herman Willem Daendels mengeluarkan surat Besluit (Surat Keputusan) mengenai infrastruktur kota Bandung (belum menjadi *Gemeente* atau kotamadya namun sekedar ibukota kabupaten Bandung).³

Kota Bandung kemudian hari dipergilirkan di setiap masa pemerintahan yang berganti-ganti (sepanjang masa kolonial hingga kemerdekaan) dari statusnya sebagai ibukota kabupaten, kemudian ibukota karesidenan, *Gemeente*, hingga ibukota provinsi. Sebagai kota pusat pemerintahan, ia memiliki dampak strategis bagi segala sentra aspek, mulai dari sentra kegiatan pendidikan, ekonomi, seni budaya, pariwisata, sentra pelesiran dan tata boga. Ia juga sempat menjadi sntra perhatian internasional di masa pemerintahan pasca kemerdekaan, yakni menjadi konferensi Asia-Afrika baik skala kepentingan umum maupun Islam.⁴

Seiring perkembangan wacana perkotaan, Kota Bandung kerap mendapat julukan-julukan sejalan dengan beragam peristiwa bersejarah yang pernah dilaluinya, seperti sandangan istilah *Paris van Java*, *Kota Kembang*, *Kota Asia-Afrika*, *Kota Lautan Api*, *Kota Kuliner*, *Kota Eropa*, dan sebagainya. Meskipun

And Environmental And Infrastructure Planning Faculty Of Spatial Sciences University Of Groningen (Groningen: University of Groningen, 2010), hal 22-24. t.d.

³ Yenni Nur'aini, *Analysis Of The Preparedness Of Bandung*, hal 24

⁴ *Konferensi Asia-Afrika* (KAA) tahun 1955 dan *Konferensi Islam Asia-Afrika* (KIAA) tahun 1965. Lihat: irvan sjafari, *Bandung 1965, Konferensi Islam Afrika Asia 6-14 Maret* <https://www.kompasiana.com/jurnalgemini/5df60af9097f3661aa7356c4/bandung-1965-konferensi-islam-afrika-asia-6-14-maret>. dikunjungi tanggal 20 Juni 2021.

demikian, terdapat kontroversi mengenai peringatan berdirinya Bandung sebagai Kota yang dikaikan dengan istilah Gemeente (kotamadya).⁵

Kaitannya dengan istilah “*Lautan Api*” atau populernya sebagai “*Bandung Lautan Api*”, Bandung pernah menjadi kota yang sarat *heroisme* di mana nyaris seluruh kota menjadi benar-benar lautan api karena keputusan heroik dari seluruh elemen masyarakat kota Bandung untuk membumihanguskan tempat mereka. Hal ini dipicu oleh kedatangan kembali para serdadu asing yang sengaja memasuki kota Bandung dengan niat menduduki kembali wilayah setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945. Para tentara asing yang terkumpul dalam berbagai satuan, baik Inggris, India, bahkan Belanda, beralih memasuki Kota Bandung untuk membebaskan para tahanan politik akibat perang dunia kedua, namun pada kenyataannya mereka memiliki kepentingan memberikan jalan mulus bagi Belanda untuk menguasai kembali eks-jajahannya setelah sebelumnya sempat diambil alih Jepang. Dibawah komando Mac Donald, Kota Bandung menjadi kota yang disetir oleh pihak asing. Mulai dari unjuk kekuatan (*Show of Force*) alat-alat tempur militer dan hilir mudik tentara yang dilengkapi senjata, hingga ultimatum-ultimatum membagi wilayah Bandung dan mengusir para pejuang dan penduduk dari wilayah yang mereka inginkan. Hal ini tentu saja menjadi *trigger* pergerakan para pejuang dan masyarakat kota Bandung dalam mempertahankan Bandung

⁵ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1906 no. 121. Sejak kota Bandung ditetapkan sebagai sebuah gemeente (1906), di kota itu terjadi perkembangan aspek fisik. Sejalan dengan perluasan wilayah kota, berlangsung pula pembangunan dan atau peningkatan prasarana atau sarana dan atau fasilitas kota, baik untuk kepentingan masyarakat umum. Lihat: Hardjasaputra (ed), *Sejarah Kota Bandung 1906-1945* (Bandung: Pemerintah Kota Bandung, 2000), hal 23.

sebagai bagian terpenting unsur wilayah Negara Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.⁶

Sejak Desember 1945 hingga Maret 1946, terjadi konflik menegangkan antara para pejuang di Bandung dengan para tentara asing. Puncaknya terjadi dalam rentang waktu antara bulan Februari hingga bulan Maret di tahun 1946 dimana ketika itu masyarakat Bandung mulai banyak yang meninggalkan Kota menuju wilayah-wilayah luar Kota Bandung di sepanjang perbukitan dan kaki gunung yang mengitari Bandung baik wilayah selatan maupun utara. Ditengah *chaos* kota itu, masyarakat dan pejuang (tercatat sekitar dua ratus ribu orang) telah sengaja membakar rumah dan harta bendanya serta menghancurkan dan membakar beberapa infrastruktur vital kota, seperti bangunan kantor pos, jawatan listrik, jantung perniagaan, dan sebagainya demi tujuan moral mempertahankan Bandung dari jamahan asing yang hendak menguasai kembali kota dan tanah mereka.

Bandung wilayah utara telah menjadi wilayah pengungsian masyarakat pribumi yang cukup mengkhawatirkan. Mereka hanya mendapatkan asupan ransum kalengan untuk bertahan hidup dan terus menerus mengalami teror serangan militer dan perang kedua belah pihak (pejuang dan tentara asing). Sementara itu Bandung wilayah selatan menjadi tempat yang strategis dan cukup aman dari jamahan tentara asing. Keadaan itu digunakan sebagai penggalangan kekuatan para pemuda pejuang

⁶ Mohamad Rivai, *Tanpa Pamrih mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17-8-1945* (Suternasa: Jakarta, 1983), hal 71.

untuk kemudian hari merebut kembali kota Bandung dengan gencaran-gencaran pertempuran yang lebih signifikan dan berskala besar..⁷

Terdapat makna penting dari beberapa peristiwa yang terjadi di Kota Bandung tersebut dalam rentang lini masa sejarah kemerdekaan Indonesia. Heroisme atau semangat kepahlawanan tentu saja menjadi inti dari peristiwa bersejarah sepanjang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang melibatkan banyak unsur pengorbanan, baik materi maupun immateri. Pengorbanan-pengorbanan tersebut telah melahirkan dampak yang begitu besar bagi keberlangsungan berkebangsaan.

Mengenai elemen pejuang pada peristiwa tersebut, didapati sejumlah fakta dan fenomena yang menarik, dimana para pejuang yang turun ke lapangan tidaklah terbatas pada elemen structural, status sosial, dan bahkan gender. Mereka yang bertempur ialah anasir Tentara Rakyat Indonesia, laskar-laskar pejuang yang dibentuk sepanjang masa revolusi, kalangan pemuda dan remaja lelaki dan bahkan para perempuan.

Salah satu anasir terpenting dalam sejumlah elemen pejuang itu ialah kesatuan laskar Hizbullah. Tercatat, Kesatuan ini sebelumnya memiliki 13 *daidan* Hizbullah di seluruh wilayah Jawa Barat. Kemudian dibentuklah dua divisi Hizbullah ketika pemerintah mulai mengkondisikan ketentaraan dalam format TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang kemudian dibentuk badan-badan kelasykaran.

⁷ Mohamad Rivai, *Tanpa Pamrih mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17-8-1945* (Suternasa: Jakarta, 1983), hal 71.

Kedua divisi Hizbullah itu masing-masing dipimpin oleh Zainul Bachri (Zainul Bakri) dan Samsul Bachri (Samsul Bakri). Mereka adalah pimpinan Hizbullah yang sebelumnya juga telah mendapatkan pendidikan dan latihan perwira di Cibarusa yang diselenggarakan pada bulan-bulan akhir menjelang menyerahnya Jepang.

Selain kedua nama diatas, dari Hizbullah Bandung juga memunculkan nama-nama pemimpin kesatuan-kesatuan Hizbullah lain dalam tingkatan satuan yang lebih dibawahnya lagi seperti Huseinsyah, Zinul Abidin, Kamran, H. Junaidi, Qadar Sholihat, Aminuddin Hamzah, dan lain-lainnya.

Pada tahun 1946, Pondok Pesantren Cijawura Bandung pernah menjadi basis pos pertahanan para pejuang (Hizbullah dan Sabillillah) dalam rangka mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya tersebut gugur sekitar 200 orang pejuang Ketika sedang melakukan sholat Ju`mat yaitu :Tajudin bin Wiratma, Muhyiddin bin Madhori, Mahmud bin Irta, Habib bin Aldasik, Ajengan Baihaqi, Ajengan Qurtubi, Ajengan Sudrajat, Ajengan Samsudin, K.H. Umar, Thoha bin Abdullah, Nana bin H. Yusuf, Ajengan Hasan Ibrahim, Rd. Wiranata Kusuma, H. Sukardi.⁸

Penelitian Peran Ulama dalam mempertahankan wilayah Bandung pada peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946. Memiliki alasan tersendiri karena

⁸ Tajudin bin Wiratma, Muhyiddin bin Madhori, Mahmud bin Irta, dan Habib bin Aldasik kesemuanya dari Ciseureuh Pacet. Ajengan Baihaqi, Ajengan Qurtubi, Ajengan Sudrajat, Ajengan Samsudin, dan K.H. Umar kesemuanya dari Ciamis. Thoha bin Abdullah Dari Gede Bage Bandung. Nana bin H. Yusuf dari Ciganitri Bandung. Ajengan Hasan Ibrahim dari Cikatomas, Tasikmalaya. Rd. Wiranata Kusuma dari Tasikmalaya. Dan H. Sukardi dari Cibatu, Garut. Wawancara dengan K.H. Asep Usman R, Pimpinan Pondok Pesantren Margasari Cijawura, tanggal 17 Juni 2021.

adanya hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Banyak berhubungan dalam Peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada bulan Maret, sehingga memiliki dampak mulai dari politik, sosial, serta keagamaan, sehingga muncul semangat proklamasi kemerdekaan dalam peristiwa yang besar dan semakin memantapkan jiwa perjuangan rakyat Bandung untuk mempertahankan kemerdekaan di Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis pun merumuskan permasalahan berupa beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi Kota Bandung dan perlawanan ulama pada peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946?
2. Bagaimana dampak peristiwa, peran dan nilai perlawanan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan terhadap pihak sekutu di Bandung tahun 1946?

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui kondisi Kota Bandung dan perlawanan ulama pada peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946.

2. Mengetahui dampak peristiwa, peran dan nilai perlawanan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan terhadap pihak sekutu di Bandung tahun 1946.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis, khalayak umum, khazanah ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah kegunaannya :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pemahaman mengenai sejarah peranan ulama-santri dan laskar muda dalam mempertahankan wilayah Bandung dari agresi Belanda tahun 1946 Selain itu juga nilai tambah khazanah pengetahuan ilmiah dibidang kesejarahan di Indonesia.

2. Kegunaan secara praktis

Bagi umum, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam mengkaji ilmu kesejahtraan, khususnya tentang peranan ulama-santri dan lascar muda dalam mempertahankan wilayah Bandung dari agresi Belanda tahun 1946.

Bagi penulis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut bilamana masih terdapat kekurangan karena terkendala keterbatasan dari segi sumber dan pemahaman penulis.

E. Kerangka pemikiran

Sebuah penelitian tentu diperlukan pendekatan dan teori yang membantu mempermudah penelitian dalam memahami objek yang akan dikaji. Studi ini pada dasarnya adalah studi sejarah, yakni studi yang sifatnya diakronik yang memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Namun jika permasalahan berkaitan dengan perkembangan sosial maka dianjurkan pula memakai pendekatan ilmu sosial, yaitu pendekatan sinkronis yang meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Dua pendekatan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat saling melengkapi dalam penulisan sejarah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengelaborasi konteks yang terjadi pada atmosfer revolusi Indonesia di wilayah Bandung tahun 1946. Sebagaimana disebutkan Peter Burke bahwa pengkaji sejarah dan ilmu sosial sangatlah dekat. Mereka sama-sama menaruh perhatian kepada masyarakat pada seluruh aspek termasuk politik.⁹

Adapun teori aplikatif yang penulis gunakan ialah teori fungsionalisme struktural, dimana pengaruh stratifikasi sosial dan pola kepemimpinan non-formal dapat mempengaruhi bangunan sistem masyarakat secara signifikan. Satu posisi sosial dalam bangunan masyarakat yang sudah tercipta sedemikian rupa bilamana tidak berfungsi bangunan tersebut akan runtuh dengan sendirinya. Analogi gagasan

⁹ Pendekatan ilmu sosial bagi kajian sejarah diantaranya ialah mengungkapkan unsur-unsur sosial dengan bangunan konsep sosiologi seperti struktur sosial, sistem politik, jaringan interaksi, struktur organisasi, pola kelakuan, dan sebagainya. Lihat: Peter Burke, *History and Social Theory* (Cambridge: Polity Press, 1992), hal 2-3.

inti dari teori fungsionalisme struktural adalah organ tubuh yang berniscaya kefungsiannya dengan keberlangsungan hidup.¹⁰

a. Konsep Ulama dan Perannya.

Istilah Ulama yang digunakan dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah merupakan serapan dari salah satu kosakata bahasa Arab yang bermakna seorang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹¹ Secara umum dalam konteks keindonesiaan, Ulama diartikan sebagai manusia muslim yang memiliki kedudukan vital dalam stratifikasi sosial karena penguasaan ilmu sekaligus memiliki kemampuan *leadership* yang berperan penting dalam struktur masyarakat.¹²

Sementara itu dalam perbendaharaan istilah dunia Islam, beberapa tokoh agama secara umum (bukan dalam konteks regional) memberikan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan Ulama. Pembahasan mengenai istilah ini tidak terlepas dari bahasa induk Islam yaitu bahasa

¹⁰ Teori Fungsionalisme Struktural melihat keniscayaan pada bentukan stratifikasi sosial dan hierarki pada masyarakat. Dimana masyarakat bergerak pada sistem yang terstratifikasi yang semuanya memiliki fungsi yang niscaya dalam sistem kemasyarakatan. Stratifikasi bukanlah soal status “jabatan” tertentu dalam masyarakat yang terstruktur, melainkan lebih pada fungsional posisi kemasyarakatan sebagai bagian sistem yang terbentuk. Posisi-posisi stratifikasi itu seerti organ-organ biologis, ada jantung, ginjal dan sebagainya. Jika kemudian salah satu organ itu tidak berfungsi, maka akan berkonsekwensi pada chaos-nya tatanan sistem. <http://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2021.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 1520.

¹² Lihat: Clifford Geertz, *The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker* in: *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 2, No. 2 (Cambridge: Cambridge University Press 1960), hal 228-249.

Arab, oleh sebab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, bahwa setiap istilah yang muncul adalah merupakan struktur yang tersistematis dalam suatu bangunan epistemologi worldview tertentu. Dalam hal ini, Ulama adalah istilah yang sangat melekat pada worldview keislaman yang identik dengan Bahasa Arab. Sebut saja tokoh-tokoh seperti Imam Mujahid, Hasan Basri, Ali Ash-Shobuni, Ibnu Katsir, Sayyid Quthub, Syeikh Nawawi Al-Bantani, dan Wahbah Zuhaili. Mereka memberikan interpretasi yang tidak lepas dari tradisi ilmu keislaman yang bersandar pada teks kewahyuan, dimana Ulama (sebagaimana sumber Al-Qur'an dan tradisi profetik) adalah sosok figur muslim yang memiliki ikatan spiritualitas yang tinggi dengan sang Pencipta (rasa *khasyyah*, sikap *ihsan*, dan *ma'rifat*) serta mampu menggunakan karunia ciptaan menjadi sarana ibadah yang tak terbatas.¹³

Dalam konteks penelitian ini, ulama yang dimaksud tentu saja adalah ulama yang merepresentasikan kedua bangunan istilah yang telah disebutkan diatas. Selain sebagai ahli di bidang ilmu pengetahuan Islam secara mumpuni, memiliki nilai spiritualitas yang tinggi, mereka juga merupakan titik sentral pergerakan, perubahan, dan dinamika masyarakat yang penting kedudukannya.

Sejalan dengan itu, istilah “peran” yang merupakan pembahasan variable berikutnya dalam penelitian ini, sangat memiliki relevansi yang

¹³ Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal 45-56

berkesinambungan dengan entitas ulama. Dimana “peran” dimaknai sebagai istilah yang melekat antara status dan perilaku dengan konsekwensi keberlangsungan sistem suatu masyarakat. Sebagaiman menurut Soerjono Soekanto, keberadaan peran sangat diharapkan oleh elemen sistem masyarakat sebagai suatu keniscayaan keberlangsungan status seseorang atau sekelompok orang, oleh sebab kedudukan atau status tidak akan terpisah dari peran, dan demikian peran tidak akan bisa terpisah dari status atau kedudukan.¹⁴

Adapun peran Ulama yang disorot dalam pembahasan penelitian ini adalah berkaitan erat dengan dinamika pergerakan sosial-politik kebangsaan. Demikian disebutkan oleh Wan Mohd Nor Wan Daud, bahwa para ulama memiliki pandangan kritis terhadap bangunan sosial kemasyarakatan dari masa ke masa. Sebagaimana pandangannya Al-Attas mengenai rusaknya sistem kemasyarakatan karena sistem penyelenggaraan masyarakat yang bermasalah, baik oleh kapasitas kepemimpinan, ilmu pengetahuan, maupun degradasi etika perikehidupan.¹⁵

Pemikiran kritis serupa pula menjadi idealisme kokoh yang mendorong para ulama untuk melakukan perbaikan demi perbaikan setiap zaman, termasuk masa kolonialisme dan pasca kolonialisme. Ada semacam *Sense*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2001), hal 268- 269

¹⁵ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M Naquib Al-Attas* (Bandung: Mizan, 2000), hal 117-118.

of Belonging dan *Sense of Responsibilities* yang tertanam kuat didalam jiwa para ulama sebagai pemegang otoritas agama untuk terus berupaya memperbaiki keadaan umat.¹⁶

Sebagaimana diketahui, pada masa kolonialisme para ulama di Indonesia banyak terinspirasi oleh gerakan-gerakan kebangkitan Islam dan upaya-upaya membebaskan diri dari penjajahan di dunia internasional sejak runtuhnya adidaya Turki Utsmani dari keberkuasaannya sebagai pemerintahan berbasis idealisme Islam. Misalnya beberapa gerakan yang muncul di benua Afrika, dan Jazirah Arab modern yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pemikiran populer di masa itu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lainnya.¹⁷

¹⁶ Peradaban Islam telah mencerahkan kehidupan manusia secara bermartabat sesuai fitrahnya, yakni memuliakan akal dan hati sebagai parameter kebenaran untuk tidak mengkhianati hakikat keyakinan terhadap Pencipta (dalam bahasa prinsip keyakinan disebut ber'aqidah Tauhid) dan melihat alam sebagai yang diciptakan sang pencipta untuk dapat dikelola menjadi energi yang maslahat dengan kaidah-kaidah kebenaran tersebut. Demikian Islam sampai pada kedudukan tinggi sebagai ajaran dan norma yang mengilhami peradaban seperti yang diakui para sarjana barat dan timur. Tanpa mengenal Islam, bangsa barat akan selamanya hidup dalam masa kegelapan dibawah pengendalian otoritas gereja dan dogma Kristianitas. Seperti yang pernah diungkap Sigrid Hunke dalam karyanya "*Allahs Sonne Uber Dem Abendland – Unser Arabisches Erbe*" (Cahaya Allah menerangi daratan Eropa – Pengaruh bangsa Arab atas oksidentalism). Lihat: Ilham Darajat, *Catatan Perkuliahan Bersama Prof. Ahmad Mansur Suryanegara*, <https://www.kompasiana.com/ilhamdarajat/60f9680606310e6ce215d9b2/catatan-perkuliahan-bersama-prof-ahmad-mansur-suryanegara>, diakses pada 22 Juli 2021.

¹⁷ Kebangkitan Islam merupakan kesadaran bersama umat Islam sebagai sebuah kebangkitan baru yang menghendaki adanya pergerakan perlawanan idealisme yang saling berhadapan dengan peradaban barat. Dimana peradaban barat itu telah banyak mengintervensi kehidupan negeri-negeri muslim dengan upaya-upaya intimidasi, kolonialisasi dan imperialisasi. Fenomena gerakan tersebut terjadi sekitar abad ke-19 hingga 21. Ia juga merupakan momentum kesadaran terhadap keadaan ketertinggalan yang terjadi di berbagai belahan dunia umat Islam. Namun demikian, sebenarnya kebangkitan itu sendiri tidaklah semata-mata disebabkan kompetisi peradaban dengan pihak barat saja. Lihat: Red. Nashih Nashrullah, *Kebangkitan Islam dari Asia Tenggara Menurut John L Esposito*, diakses pada 12 Juli 2021.

b. Teori Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa “Peran” berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁸ Dalam sistem sosial, peran mencerminkan posisi seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban, kekuasaan, dan tanggungjawab yang menyertainya. Oleh karena itu peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.¹⁹

Peran menurut Koentjaraningrat berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu. Dengan demikian peran menunjuk pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem kemasyarakatan. Sementara menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.²⁰

Kaitan teori peran sebagai variable utama penelitian ini adalah sejauhmana keikutsertaan para ulama dalam tindakan politik kebersamai perjuangan bangsa Indonesia yang tengah mempertahankan kemerdekaan

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 1051.

¹⁹ Torang Syamsir, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 86.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Raja Grafindo, 2010), hal 112-113

yang telah dicapai. Khususnya ulama di lingkungan perjuangan Kota Bandung pada kurun waktu 1946. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, keikutsertaan politik adalah bagian dari tindakan individu warga bangsa yang dapat mempengaruhi keputusan otoritas. Keikutsertaan itu dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontanitas, efektif atau tidak efektif.²¹ Sementara para ulama yang dimaksud dalam penelitian ini berpartisipasi aktif dan berpengaruh pada dua komponen penting bangsa, yakni pemerintah, dan masyarakat.

c. Nasionalisme Ulama

Sebagaimana disebutkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menggerakkan dinamika kebangkitan Islam di dunia internasional pada masa hegemoni imperialisme barat abad 19 dan 20, kalangan ulama Indonesia menyambut perubahan semangat kebangkitan itu dengan penuh gairah. Terutama setelah munculnya kesadaran bahwa adanya upaya signifikan dari perlakuan Kerajaan Protestan Belanda yang semena-mena hendak menjadikan wilayah nusantara sebagai *Pax Nederlandica*, sebuah istilah kedaulatan imperialisme Belanda.²²

Tentu saja hal tersebut membangkitkan *sense of belonging* para ulama untuk menyadarkan seluruh elemen bumiputera dari keterjajahan bangsa

²¹ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2003), Bab X.

²² Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 1, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Bandung: Suryadinasti, 2016), hal 283.

asing. Mereka serempak menyeru kepada kesadaran bangsa nusantara yang majemuk dalam ragam wilayah antropososial, untuk sama-sama mencintai tanah air, membela, dan memperjuangkan hak keberlangsungan hidup bumiputera dengan segenap jiwa dan raga. Upaya inilah yang disebutkan Suryanegara sebagai gerakan Nasionalisme.²³

Ulama, dalam perspektif sosiologis merupakan komunitas elit yang memiliki keberpengaruh signifikan (baik secara kualitas maupun kuantitas) di tengah dinamika kehidupan masyarakat.²⁴ Otoritasnya sebagai agent of change membuat ulama muncul sebagai pemimpin non-formal yang didengar dan ditaati masyarakat. Mereka memiliki kharisma tersendiri terutama disaat masyarakat dihadapkan persoalan-persoalan spiritualitas dan tradisi yang rumit. Wibawa mereka terkadang melebihi kapasitas pemimpin resmi.²⁵

Sebagai komponen stratifikasi sosial yang mendapat tempat khusus bagi masyarakat, pemerintah melihat adanya pola hubungan yang menguntungkan bagi stabilitas pertahanan negara dan bangsa terutama disaat kemerdekaan negeri mesti dipejuangkan. Pemerintah mulai

²³ Suryanegara, *Api Sejarah 1* (Bandung: Suryadinasti, 2016), hal 284.

²⁴ Dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya di masa perjuangan kemerdekaan tidak luput pula dari gejolak benturan wacana prinsip internal beragama. Diantaranya ialah diskursus panjang tradisional dan “pembaharu”. Namun demikian, riaknya perbedaan tidaklah menyurutkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Seperti disebutkan A.M. Suryanegara dalam buku *Api Sejarah* menulis sekelumit organisasi Persatuan Islam misalnya, yang atas prakarsa Haji Zamzam dan Haji Yunus.

²⁵ Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal 42-47.

membentuk struktur dan jaringan guna memaksimalkan usaha mempertahankan kemerdekaan.

d. Teori Fungsionalisme Struktural

Berangkat dari pandangan dasar mengenai persoalan pokok ilmu sosial, terdapat realitas kehidupan masyarakat sebagai fakta sosial yang dapat dikaji melalui struktur sosialnya. Emile Durkheim menyebutkan bahwa fakta sosial terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk material, di mana sesuatu yang nampak dapat diobservasi. Yang kedua adalah bentuk non material, di mana sesuatu tidak nampak namun dianggap nyata. Bentuk ini ialah fenomena inter-subjektif yang hanya ada dalam kesadaran insaniyah. Namun demikian, secara makro, fakta sosial sendiri memiliki tipe-tipe tertentu. Diantaranya ialah struktur sosial dan pranata sosial.

Robert Merton dan Talcott Parsons yang pertama kali mengembangkan teori Fungsionalisme Struktural di tahun 1930. Teori tersebut merupakan respon terhadap teori evolusi. Dalam tema dinamika sosial, gagasan fungsionalisme structural memiliki keterkaitan melalui konsep *human capital theory* dan modernisasi. Menurut teori ini, masyarakat merupakan sistem utuh, di mana di dalam sistem tersebut, terdapat bagian-bagian penting yang saling berkaitan. Kaitan ini disebut sebagai interrelasi dengan pola normative agar tercipta keseimbangan dalam keberlangsungan bermasyarakat.

Dalam mencapai harmonisasi masyarakat, diyakini bahwa sistem keyakinan sebagai pedoman hidup atau dengan bahasa lain ialah agama, menjadi alternatif harmonisasi masyarakat yang efektif. Disebutkan pula bahwa agama dapat membantu peran negara dalam upaya menjaga stabilitas bernegara dan berbangsa.²⁶

Teori Fungsionalisme Struktural-nya Talcots Parsons diyakini sebagai sebuah pandangan tentang sistem sosial yang terbangun dari pelbagai elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam *equilibrium*²⁷ atau keharmonisan. Keterkaitan itu berpengaruh pada perubahan holistik sebuah sistem kemasyarakatan, dimana bila terjadi perubahan pada satu elemen, maka elemen yang lain serta merta akan berubah.²⁸ George Ritzer menyebutkan, bahwa teori fungsionalisme struktural memiliki asumsi dasar di mana tiap-tiap struktur berlaku secara fungsional bagi yang lainnya. Dan bilamana tidak ada fungsionalitas maka itu menyebabkan struktur menjadi hilang dengan sendirinya. Teori ini memiliki kecenderungan memandang kontribusi suatu sistem terhadap sistem lainnya.

²⁶ Astrid S Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hal 202.

²⁷ *Equilibrium* berasal dari bahasa latin; *aequilibrium*, dimana terdapat kata penggalan awalan berbunyi *aequil* yang bermakna *equal* berarti setara atau sama, dan *libra* yang berarti adanya keseimbangan atau *balance*. Lihat: Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 30.

²⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal 21.

e. Teori Fungsional mengenai Stratifikasi Sosial.

George Ritzer dalam bukunya tentang teori ilmu sosial menambahkan bahwa terdapat dua tokoh ilmu sosial terkait ini, yakni Wilbert Moore dan Kingsley Davis. Mereka memiliki pandangan bahwa dalam realitas masyarakat terdapat stratifikasi sosial yang dapat diterima sebagai keniscayaan universal, dimana tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi, dengan kata lain bahwa masyarakat terbentuk dengan sendiri bersama kelas-kelas tertentu. Mereka melihat stratifikasi terwujud bersamaan dengan beberapa posisi yang terbentuk menjadi beberapa derajat *marwah* dan prestise. Menurut mereka, isu fungsional yang ditemukan memiliki catatan utama mengenai bagaimana masyarakat memiliki motivasi untuk menempatkan sejumlah individu pada status yang layak dalam sistem stratifikasi.²⁹

f. Teori Solidaritas Emile Durkheim

Sementara itu, dalam menyikapi dinamika realitas sosial, Emile Durkheim menemukan bahwa setiap individu masyarakat melihat pentingnya solidaritas. Solidaritas merupakan ikatan emosional yang tercipta dari konskwensi pola integrasi masyarakat. Adapun anasir integrasi dan solidaritas ialah: Persamaan agama dan keyakinan, persamaan bahasa yang digunakan, sama-sama memiliki kebutuhan kesejahteraan (ekonomi), memiliki tradisi dan sikap empati untuk bekerja sama, memiliki alur

²⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal 253-254.

atmosfir pengalaman yang sama, dan hidup dalam sikap dan tindakan dalam berperikehidupan secara bersama. Kemudian Durkheim memandang bahwa solidaritas sosial adalah termasuk gejala yang dinisbatkan pada persoalan moral masyarakat. Hal tersebut dapat ditemukan realitasnya pada kehidupan masyarakat sederhana di pedesaan, dimana gejala-gejala patologi sosial sangat mudah diselesaikan berkat ikatan moral masyarakat desa ketimbang fenomena sosial masyarakat kota.

Bagi Emile Durkheim, solidaritas sosial adalah perejawantahan kesetiakawanan yang memperlihatkan suatu kesadaran adanya hubungan atau relasi kuat dalam suatu tatanan masyarakat baik antar individu maupun kelompok yang didasarkan pada moralitas dan keyakinan yang dianut bersama kemudian diperkuat dengan pengalaman emosional.³⁰ Durkheim mengaggas bahwa terdapat dua jenis solidaritas sosial; pertama, mekanik, kemudian kedua organik. Yang pertama jenis solidaritas sosial yang sederhana. Ia terbentuk karena adanya kesamaan, dimana kondisi yang sama dan kecenderungan yang seragam terikat dalam kesatuan segmentasi masyarakat yang homogen. Biasanya pola masyarakat yang terbangun pun akan menopang kebutuhan satu sama lain bersamaan dengan kesadaran kolektif. Mereka memiliki ikatan norma berdasarkan kesadaran yang tinggi untuk menghormati nilai-nilai yang dijunjung bersama.³¹

³⁰ Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal 123.

³¹ James M. Henselin, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hal 56

Sementara itu jenis yang kedua adalah bentuk solidaritas organik. Jenis solidaritas ini mengikat masyarakat yang plural dan kompleks, di mana sistem masyarakat yang terbangun diatur sedemikian rupa secara professional dengan tanggungjawab masing-masing dan membentuk pola saling ketergantungan satu sama lain. Masing-masing elemen solidaritas memiliki fungsi yang saling berpengaruh. Pola keterikatan dan ketergantungan dalam jenis solidaritas ini mempengaruhi efektifitas dan efisiensi fungsi yang diberlakukan. Masyarakat dalam pola ini sangat bergantung pada tanggungjawab dan profesionalisme status dan pembagian kerja, sehingga bila satu komponen profesionalisme itu tidak dapat menjalankan fungsinya, fluktuasi patologi sosial dikhawatirkan muncul, dan permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan mendapatkan masalah yang signifikan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi atas hasil karya orang lain yang telah ada. Penulis melakukan penelusuran dan menggali informasi seputar masalah yang akan diteliti dari data yang telah ada untuk kemudian dikembangkan. Penulis pun menemukan beberapa karya yang telah ada dan berkaitan dengan judul penelitian diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang ditulis dan diterbitkan oleh Balai pengelolaan keurbakalaan sejarah dan nilai tradisional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang berjudul “Saya Pilih Mengungsi”, Isi buku ini memaparkan tentang mengungkapkan secara gamblang fakta sejarah dan fenomena-fenomena menarik

seputar peristiwa Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946, memiliki nilai-nilai sejarah kepahlawanan yang sangat luar biasa, diantaranya adalah menggambarkan tentang kegigihan dan semangat juang masyarakat Jawa barat dan tentara Republik Indonesia membumihanguskan harta bendanya serta rela mengungsi meninggalkan tempat tinggalnya demi mempertahankan kemerdekaan. Semangat juang dan rela berkorban untuk nusa dan bangsa merupakan nilai-nilai yang harus diwariskan kepada generasi muda.

Penelitian berikutnya adalah buku yang berjudul “Laskar Ulama-santri dan Resolusi Jihad Garda depan menegakan kemerdekaan Republik Indonesia 1945-1948”. Buku ini memaparkan kiprah Ulama-Santri yang secara tidak disadari mengungkapkan rangkaian fakta-fakta yang telah membangun suatu episteme. Perjuangan Ulama-Santri pejuang Laskar mempertahankan empat pilar kebangsaan yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan.

Penelitian berikutnya adalah buku yang berjudul “Bandung Lautan Api” buku ini menceritakan tentang pasukan Inggris yang datang ke Bandung dengan mengultimatum bahwa masyarakat Bandung harus mengosongkan wilayah Bandung terutama Bandung Utara tetapi para pejuang tidak rela apabila wilayah Bnadung dimanfaatkan oleh pihka sekutu dan NICA maka dari itu keputusan membumihanguskan Kota Bandung menjadi salah satu cara untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia terbukti dengan hangusnya kota dan diberbagai daerah sekutu tidak berani menduduki wilyah Bandung, dan akhirnya Bandung dapat dipertahankan dan warga Bandung dapat kembali ke rumah masing-masing setelah satu tahun pengungsian. Ini sebagai bahan pelajarn bahwa segala sesuatu

pasti ada Ibrah dan persatuan rakyat menjadi modal untuk terciptanya kekondusifan wilayah dengan bersatu kita maju bercerai kita akan runtuh.

Penelitian berikutnya adalah buku “Api Sejarah“ jilid 2 yang mengungkapkna tentang peran Ulama dan santri sangat menentukan keberadaannya dalam garda terdepan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan Ulama yang mengerahkan santri dari setiap pesantren menjadi pejuang laskar utama yang tonggak kemerdekaan bersama laskar muda lainnya.

Berdasarkan tulisan-tulisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis kerjakan berbeda dengan tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian penulis memfokuskan kepada satu wilayah yaitu Bandung Jawa Barat berdasarkan domisili penulis meskipun telah ada sebelumnya yang telah meneliti tentang Bandung Lautan Api tetapi dalam makna yang berbeda, penulis berharap penelitian ini dapat melengkapi studi-studi yang telah diadakan oleh para penulis sebelumnya, pada hakekatnya bersifat melengkapi atau informasi baru yang akan menambah sumber kepustakaan sejarah.

G. Metode Penelitian Sejarah

Sebagaimana semestinya dalam mengkaji sejarah, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian ialah sebuah penelitian yang tujuannya mendeskripsikan dengan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau yang bertumpu pada empat langkah.

1. Heuristik

Tahapan heuristik merupakan tahap awal dalam melaksanakan penelitian sejarah yaitu mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan judul penelitian baik berupa benda, tulisan, maupun lisan yang didapat dari Perpustakaan, Dinas Kearsipan, Museum, dll. Nina Herlina Lubis mengemukakan bahwa “pada tahapan menentukan informasi, bukan tidak mustahil bahwa kita telah dapat menghimpun sejumlah sumber berupa daftar nama informan beserta tempat di mana sumber itu berada. Dengan demikian kita telah tiba pada saat mulainya penelitian yang sesungguhnya”. Data yang terhimpun, kemudian dikelompokkan mana yang dikategorikan sebagai sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang didapat dari pelaku atau saksi yang sezaman dalam suatu peristiwa. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak sezaman tetapi mengetahui peristiwa tersebut sehingga bisa dimintai keterangan ataupun pendapatnya.

Pada penelitian ini penulis telah mendapatkan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul. Sumber tersebut penulis dapatkan dari wawancara dengan seorang veteran tahun 1945 dan penelitian ke sejumlah museum yang berkaitan dengan aktifitas Bandung Lautan Api seperti : Museum Mandala Wangsit, Museum Monju, Museum Sri Baduga, Museum Asia Afrika.

Perpustakaan Perpustakaan Nasional R.I, Dinas Kerasipan Negara R.I, Dispusipda, perpustakaan UIN, perpustakaan Batu Api, Perpustakaan FIB Unpad, sumber telah terkumpul, maka dilakukan pengklasifikasian sumber. Sehingga akan

diketahui mana saja yang termasuk sumber primer ataupun sumber sekunder. Setelah dilakukan pengklasifikasian sumber, maka bisa disebutkan sumber yang dikategorikan sebagai Sumber Primer, yaitu diantaranya :

a. Sumber Tertulis

1). Arsip Foto Tahun 1945 - 1950

- a. Arsip mengenai peristiwa terjadinya Bandung Lautan Api yang di Museum Mandala Wangsit TNI AD di Bandung
- b. Arsip mengenai Agresi Militer Belanda yang menduduki wilayah Bandung.
- c. Arsip tentang Bandung Lautan Api di Arsipnas R.I.

2). Buku

- a. Buku Bandung Lautan Api, Dinas Sejarah Angkatan Darat, Bandung : 2016
- b. Buku Saya Pilih Mengungsi, Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2013
- c. Buku Api Sejarah Jilid 2, Bandung Surya Dinasty. 2016.
- d. Buku Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad. Tangerang. 2014.

3). Koran

- a. Kedaoelatan Rakjat Maret 1946,
- b. Soeara Merdeka
- c. Arsip Kantor Berita Antara, tahun 1946

b. Sumber Lisan

Wawancara pada Ponpes Cijawura dan Ponpes Sukamiskin Bandung

c. Sumber Benda

a. Video tentang Bandung Lautan Api

b. Foto Agresi Belanda di Bandung tahun 1946

2. Kritik

Setelah data atau sumber terkumpul maka tahapan selanjutnya adalah mengkritik sumber agar dipastikan keaslian dan kesasiannya. Seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo yang dikutip kembali oleh Nina H. Lubis, adalah sebagai berikut :

Sumber yang telah ditemukan melalui tahapan heuristik itu harus diuji dahulu. Pengujian ini dilakukan melalui kritik. Setelah kita mengetahui secara tepat topik kita dan sumber sudah kita kumpulkan, tahap berikutnya ialah verifikasi, atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber. Verifikasi itu ada dua macam yaitu meneliti otentisitas sumber, atau keaslian sumber, yang disebut kritik eksternal, dan meneliti kredibilitas yang disebut kritik Internal.

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstren dilakukan untuk menentukan sejauh mana otentitas (keaslian sumber). Kritik ekstern terkait aspek luar atau kondisi fisik dari sebuah sumber. Dalam tahapan ini kita memastikan sumber itu dikehendaki atau tidak dengan cara menemukan keaslian dan keutuhannya.

Pertama untuk menentukan sumber itu asli atau tidak harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Waktu ditulis dan dikeluarkan sumber : titik tidak ada sebelumnya dan titik tidak sesudahnya.
2. Bahan atau materi sumber: kertas atau tinta
3. Identifikasi tulisan tangan, tanda tangan, cap jempol, huruf atau ejaan.

Kedua, untuk menentukan keutuhannya sumber maka yang harus dilakukan adalah kritik teks. Dengan begitu, bisa ditemukan adanya redaksi yang hilang, redaksi yang pertama adalah redaksi yang hilang diulang-ulang.

Dari sekian sumber yang terhimpun terdapat diantaranya sumber yang bisa dijamin keotentisitasnya, seperti Surat kabar “Suara Merdeka” dan “Kedaulatan Rakjat” buku-buku mengenai Bandung Lautan Api. Dilihat dari tahun terbitnya, sangat dekat dan tidak begitu jauh dengan peristiwa. Kemudian dari segi kertasnya, sudah Nampak agak kusam. Begitupun dengan tulisannya yang sudah tidak terlalu tajam dilihat. Dengan begitu dapat dipastikan keaslian dari sumber tersebut.

Selanjutnya dilakukan kritik teks untuk memastikan keutuhannya Surat Kabar, “Soara Merdeka” dan “Kedaulatan Rakjat” buku-buku terbitan Balai Budaya Sejarah dari tangan pertama atau kedua ataupun hasil wawancara dengan para veteran tahun 1946 yang masih hidup sekaligus sebagai saksi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

b. Kritik Intern

Kritik intern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas (Kesasihan sumber). Dalam tahapan ini ditentukan bisa dipercaya atau tidaknya suatu sumber yang diperoleh, yaitu dengan cara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penilaian Intrinsik.
2. Menyoroti pengarang atau penulis atau pelaku atau saksi dari sumber yang diperoleh.
3. Memastikan mampu tidaknya menyampaikan kesaksian yang benar, Yaitu dengan cara melihat hal-hal berikut:
 - a. Kedekatan antara pelaku dengan saksi terkait peristiwa tersebut;
 - b. Keahlian dari pelaku atau saksi tersebut.
 - c. Mau tidaknya menyampaikan kebenaran atau kesaksiannya.
4. Melakukan komparasi (saling membandingkan antar sumber) dan korbokasi (saling mendukung antar sumber).

Dari beberapa sumber yang terkumpul, baik yang ditulis oleh pelaku maupun saksi. Ada beberapa sumber yang ditulis ataupun tersampaikan langsung oleh pelaku ataupun tersebut disampaikan langsung oleh pelaku atau saksi yang terlibat seperti surat kabar dan buku-buku yang diterbitkan langsung oleh pelaku saksi daam peristiwa Bandung Lautan Api sumber tersebut jelas dapat dipercaya karena

tokoh yang bersangkutan terlibat secara langsung dalam peristiwa, sehingga dapat dipastikan menyampaikan pengalaman dan kesaksian dengan benar.

Selanjutnya untuk bisa lebih memastikan dan dapat dipercaya atau tidaknya suatu sumber dilaksanakan maka dapat dilakukan komparasi. (membandingkan) korbokasi (mendukung) antar sumber. Dari beberapa sumber yang didapat terdapat perbedaan pendapat antar sumber, biasanya yang ditemukan adalah perbedaan waktu peristiwa. Selain itu terkadang ditemukan kecenderungan memihak suatu tokoh dan ormas ataupun parpol tertentu. Sehingga perlu dilakukan komparasi dan korbokasi untuk saling membandingkan dan mendukungnya antar sumber, supaya bisa lebih dipastikan kredibilitas sumber-sumber tersebut.

3. Interpretasi

Nina Herlina mengemukakan bahwa “Sumber yang diperoleh melalui tahapan heuristik, setelah melalui kritik maka lahirlah fakta. Sesuatu fakta yang dibiarkan berdiri mandiri, atau sejumlah fakta yang disusun berurut sekalipun secara kronologis, belumlah merupakan kisah sejarah. Antara fakta dan kisah sejarah ada suatu tahapan yang harus ditempuh yaitu tahapan interpretasi“. Dalam tahapan ini dilakukan analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) dari fakta-fakta yang telah lolos tahapan kritik ekstern maupun intern.

4. Historiografi

Tahapan ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah, setelah dilakukan penafsiran dengan hasil serangkaian fakta yang tersusun secara singkat.

Maka dilakukan penulisan dari serangkaian fakta yang tersusun tersebut kemudian dikembangkan secara terperinci menjadi sebuah tulisan sejarah. Pada tahap ini, penulis dituntut untuk dapat mengaitkan fakta yang ada secara logis dan sistematis agar menghasilkan tulisan yang baik dan benar. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Pada Bab I berisi pendahuluan, yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Pada Bab II dibahas mengenai Kondisi sosial politik Kota Bandung menjelang peristiwa Bandung Lautan Api.

Pada Bab III dibahas tentang Peran ulama dalam mempertahankan Kota Bandung pada peristiwa Bandung Lautan Api.

Pada Bab IV dibahas secara spesipik mengenai Peran Ulama dalam Peristiwa Bandung Lautan Api.

Pada Bab V bagian ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian. Bab ini juga dinamakan bagian penutup. Adapun yang menjadi pembahasannya yakni kesimpulan.